



Collaborative Governance in the Development of Culinary MSMEs

Kikin Oktavinia^{1a}, Ginung Pratidina^a, Afmi Apriliani^a, Mulyadi^b, Mohd Nor Syahizan Ali^c,

^aDepartment of Public Administration, Universitas Djuanda, Indonesia

^bDepartment of Management, Universitas Djuanda, Indonesia

^cUniversiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 24-04-2025

Revisi pertama tanggal: 24-11-2025

Diterima tanggal: 09-04-2026

Tersedia online tanggal: 29-04-2026

Keywords: Collaborative Governance, Culinary MSMEs, Partnership.

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in creating local products and driving regional economic growth. The Government of Bogor Regency promotes the development of local products, particularly in the culinary sector. However, its implementation faces complex challenges among stakeholders, making collaboration an effective solution. One such initiative is a partnership program between the Department of Cooperatives and MSMEs (DISKOPUKM) and PT Indomarco Prismatama, the operator of Indomaret. This study aims to examine how collaboration operates within this partnership program, as well as to identify the challenges and efforts during the collaborative process. A descriptive quantitative method was employed, involving 32 respondents consisting of DISKOPUKM employees and MSME partners of Indomaret. The samples were selected using saturated and purposive sampling techniques. Data were collected through questionnaires, observation, interviews, and literature review. The results indicate that collaborative governance has been effectively implemented, with all dimensions well applied, as reflected by an average score of 4.24 (employees) and 4.12 (MSMEs). The highest dimension for employees is Collaborative Dynamics, reflecting effective communication and coordination, while for MSMEs it is Collaborative Actions and Outcomes, indicating tangible benefits. The lowest dimensions Drivers (employees) and Collaborative Dynamics (MSMEs) suggest the presence of uncertainty, communication barriers, and capacity gaps. The main challenges identified include issues in communication and coordination, suboptimal leadership, dependency on certain actors, and inconsistency among MSMEs in maintaining partnerships. Therefore, strengthening communication and coordination, enhancing leadership in collaboration, and establishing regular monitoring and evaluation mechanisms on a monthly basis are necessary to ensure measurable and sustainable outcomes of the collaboration program.

ABSTRAK

UMKM merupakan salah satu pencipta produk lokal dan juga penggerak ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya untuk mendorong pengembangan produk lokal salah satunya di Bidang Kuliner. Namun dalam pelaksanaannya mengalami tantangan antar aktor yang rumit, solusi efektif dalam melaksanakan program pengembangan tersebut dilakukan lewat kolaborasi. Salah satunya menjalin program kolaborasi kemitraan dengan sektor swasta yaitu Dinas Koperasi dan UMKM (DISKOPUKM) dengan PT Indomarco Prismatama (Indomaret). Tujuan dari studi ini untuk mengkaji lebih rinci tentang bagaimana kolaborasi dapat berjalan dalam program kemitraan ini, serta mengkaji hambatan dan upaya yang dilakukan selama proses kolaborasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif melibatkan 32 responden yang terdiri dari pegawai Diskopukm dan pelaku Umkm mitra Indomaret. Sampel diambil menggunakan Teknik Sampling Jenuh dan Purposive sampling. Teknik Analisis Data dikumpulkan melalui kuesioner, observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Collaborative Governance sudah berjalan efektif, Semua dimensi Collaborative Governance telah diterapkan dengan baik. Dengan menunjukkan 4,24 (pegawai) dan 4,12 (Umkm). Dimensi tertinggi pada pegawai adalah Dimensi Dinamika Kolaborasi yang mencerminkan komunikasi dan koordinasi yang baik, sedangkan pada Umkm adalah Dimensi Collaborative Actions and Outcomes yang menunjukkan manfaat nyata. Dimensi terendah terdapat pada Dimensi Drivers (pegawai) dan Dimensi Dinamika Kolaborasi (Umkm), yang mengindikasikan masih adanya ketidakpastian, kendala komunikasi, dan ketimpangan kapasitas. Hambatan kolaborasi yang ditemukan meliputi komunikasi dan koordinasi, Kepemimpinan yang Belum Optimal, Ketergantungan pada Pihak Tertentu, Konsistensi Umkm pada Kemitraan. Oleh karena itu, diperlukan Penguatan Komunikasi dan Koordinasi Antar Pihak, Penguatan Kepemimpinan dalam Kolaborasi serta Perlu membuat mekanisme

monitoring dan evaluasi rutin yang menjadi hambatan selama program tersebut dijalankan setiap satu bulan sekali untuk mengukur capaian program kolaborasi secara terukur.

1. Pendahuluan

Dalam kondisi yang serba sulit ini, mendorong banyak orang untuk menjadi kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif merupakan dua hal yang berbeda namun saling terikat (Fatimah, 2022). Kemampuan ini bisa menghasilkan ide-ide baru atau menjadikan ide ini sesuatu yang baru dan bernilai. Dari terciptanya ide dan nilai itu sendiri mendorong banyak berdirinya usaha baru, terutama usaha kecil kelas menengah ke bawah (Tritura Andang Mangeka, 2024). UMKM merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah yang berdiri dengan kebutuhan modal yang minim. UMKM dapat menjadi pemulih kondisi perekonomian yang serba sulit ini. Umkm juga dapat menjadi solusi yang tepat dalam mengurangi pengangguran. UMKM juga mempunyai keunggulan dibandingkan usaha besar lainnya yakni memiliki fleksibilitas dan dapat dengan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan dan pengembangan. Peran ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana pemerintah memikul tanggung jawab besar terhadap keberhasilan pembangunan. Dalam pengembangan UMKM, tanggung jawab ini diwujudkan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk kemitraan dengan swasta dan masyarakat, guna memperkuat daya saing dan keberlanjutan UMKM secara menyeluruh (Pratidina *et al.*, 2023).

Pemerintah mngeluarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Kemudian UMKM juga di dukung oleh PP Nomor 7 tahun 2021, berkaitan dengan akses kemudahan, aspek perlindungan, dan upaya pemberdayaan koperasi serta UMKM. Kemudian Provinsi Jawa barat mengimplementasikan UU tentang UMKM lewat Perda Nomor 1 tahun 2019 tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. UMKM di Kabupaten Bogor juga memiliki potensi besar dalam mengembangkan produk-produknya dalam pemberdayaan UMKM Pemerintah Kabupaten Bogor. Dikutip melalui (Hasan Haikal Tholib *et al.*, 2023) Perda Kabupaten Bogor Nomor 1 tahun 2019 dilakukan dalam bentuk (1) pendidikan dan pelatihan, (2) pembinaan manajemen usaha, (3) peningkatan akses pasar, (4) pengutan permodalan, dan (5) penguatan organisasi. Melalui Peraturan Bupati

(Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 43 tahun 2024 tentang pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro. Perbup ini mengatur beberapa hal meliputi (1) Fasilitasi desain dan penguasaan teknologi tepat guna, (2) Penyediaan sarana dan prasarana, (3) Pendampingan bagi pelaku usaha mikro, (4) kemudahan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan. Berbagai upaya lain yang diinisiasi oleh Pemkab Bogor yaitu harus mampu melakukan kolaborasi untuk mengembangkan UMKM. Kemunculan dan pengembangan kolaborasi dilakukan secara adaptif guna menghadapi tantangan kompleks dalam isu-isu publik dan dinamika konflik bernuansa politik (Mulyana, 2023).

Lewat Dinas Koperasi dan UMKM, pemerintah daerah berupaya mendorong pengembangan UMKM, salah satunya menjalin program kemitraan lewat Sektor Swasta. Untuk memwujudkan pengembangan umkm tersebut, terciptalah kolaborasi melalui Dinas Koperasi dan UMKM (DISKOPUKM) dengan PT Indomarco Prismatama (Indomaret). Namun, ditengah potensi besar program kolaborasi ini belum semua UMKM berhasil memanfaatkan program kemitraan ini secara optimal.

Proses kolaborasi antar sektor tersebut menghadapi sejumlah tantangan, Beberapa tantangan utama meliputi kurangnya pemahaman, kurangnya akses informasi, lemahnya komunikasi intensif antar aktor, dan masih adanya komitmen terhadap UMKM yang tidak bersifat *continue*. Artikel ini dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut untuk bagaimana Collaborative Governance dapat berlangsung dalam program kolaborasi kemitraan Pemerintah Kabupaten Bogor lewat Dinas Koperasi dan UMKM bersama Indomaret.

Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan arah bagi DISKOPUKM Kabupaten Bogor dan stakeholder terkait untuk menjadikan *Collaborative Governance* sebagai strategi pembangunan UMKM kuliner yang efektif dan berkelanjutan.

2. Teori

Proses kolaborasi dalam penelitian ini sejalan dengan konsep *Collaborative Governance* model *Collaborative Governance Regime* (CGR) yang dikemukakan oleh (Emerson *et al.*, 2012) yang menggambarkan kolaboratif sebagai bentuk proses

dan sistem pengambilan keputusan dalam manajemen kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor dari berbagai sektor publik secara lintas sektoral untuk melakukan tujuan publik yang tidak mungkin dapat dilakukan sendiri.

Teori CGR ini menguraikan secara mendalam proses kolaborasi yang berlangsung secara dinamis dan berulang, menghasilkan serangkaian aksi dan dampak sementara sebagai tahapan awal sebelum mencapai hasil akhir, serta menunjukkan kemampuan beradaptasi terhadap dampak sementara tersebut. CGR memiliki tiga dimensi utama yaitu:

1. Dimensi Pendorong (Drivers),
Menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh faktor-faktor eksternal atau sistem konteks, tetapi juga oleh motivasi atau dorongan yang mendorong aktor untuk bekerja bersama dalam mencapai tujuan bersama.
2. Dinamika Kolaborasi
Merupakan tahap-tahap kolaborasi sebagai suatu proses berurutan yang berlangsung seiring waktu, dimulai dari identifikasi masalah hingga penetapan agenda dan pelaksanaan.
3. Tindakan dan Hasil (*Collaborative Actions and Outcomes*)
Ini mengacu pada hasil nyata dari dinamika kolaboratif. Namun yang dimaksud dengan Tindakan dan hasil dalam CGR adalah dampak sementara selama berjalannya kolaborasi antar aktor.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2020), pendekatan ini berdasar pada pandangan positivisme dan digunakan untuk mengkaji fenomena pada kelompok populasi atau sampel tertentu secara sistematis.

Selanjutnya, penelitian ini melibatkan dua kelompok sebagai populasi, yaitu pegawai Dinas Koperasi dan UMKM yang berjumlah 17 orang dan UMKM yang terseleksi bermitra dengan Indomaret

berjumlah 15 UMKM. Dalam penelitian ini dikarenakan pegawai diskopukm hanya terdapat 17 pegawai, maka peneliti menggunakan sampel jenuh yang dimana semua anggota populasi yang digunakan sebagai sampel. Kemudian dalam penentuan sampel UMKM peneliti menggunakan purposive sampling atau sample bertujuan, teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel di mana subjek atau elemen sampel dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Total sampel pada penelitian ini sebanyak 32 orang yang terdiri dari UMKM bidang kuliner yang terseleksi bermitra dengan Indomaret dan Pegawai Diskopukm kabupaten bogor. Selain sampel yang sudah ditentukan, pengambilan data juga dilakukan kepada pihak-pihak lain seperti perwakilan dari Indomaret. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri:

1. Kuesioner, menurut (Sugiyono, 2020) Teknik pengumpulan data yaitu dengan menyebarkan pertanyaan tertutup yang berisikan serangkaian pertanyaan untuk mendapatkan informasi dari responden. Dalam penelitian ini menggunakan skala liker guna mengukur persepsi terhadap dimensi Pendorong (Drivers), Dinamika Kolaborasi dan Tindakan dan hasil.
2. Observasi, Teknik pengumpulan data ini adalah dengan cara mengamati fenomena yang sedang berlangsung di lapangan. Mengamati secara langsung Produk UMKM di Indomaret.
3. Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui interaksi tanya jawab secara langsung dengan responden yang sejalan oleh penelitian seperti Pegawai DISKOPUKM, UMKM bermitra, dan pegawai Indomaret
4. Studi Kepustakaan, ini berasal dari berbagai sumber seperti buku, artikel ilmiah, laporan penelitian, jurnal dan sumber lainnya. untuk mendalami teori, konsep atau temuan penelitian yang sudah ada sebelumnya untuk mendukung peneliti sesuai dalam topik penelitian yang sudah ada. Data yang dikumpulkan kemudian

dianalisis menggunakan metode Weight Mean Score (WMS) untuk mengetahui rata-rata persepsi responden terhadap kategori penilaian seperti sangat baik, baik, cukup baik, tidak baik, dan sangat tidak baik.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

UMKM atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu pelaku usaha yang dapat menjadi penggerak perekonomian nasional. Keberadaan dari UMKM memberikan banyak sekali nilai positifnya baik bagi pelaku UMKM, masyarakat, wilayah setempat, dan juga negaranya. UMKM merupakan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat produktif, dengan kriteria tertentu terkait jumlah kekayaan dan omzet tahunan (Ghazani, 2015). Dikutip oleh (Kustanti, 2022) menurut Departemen Perdagangan, industri kreatif, Sebagai bentuk usaha berskala kecil dan menengah, UMKM umumnya memiliki keterbatasan dalam sumber daya manusia, khususnya dalam hal pengetahuan dan pemahaman terkait pengembangan usaha.

Kemudian Dikutip oleh (Kurniawan & Alhifni, 2022) menurut (Hidayati & Muslikh, 2018) UMKM mempunyai keunggulan dibandingkan dengan usaha besar lainnya, yakni memiliki sifat fleksibilitas dan dapat dengan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar, hal ini menunjukkan peluang bagi UMKM untuk dapat terus bangkit dan berkembang.

UMKM memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian, tidak hanya sebagai Solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran, tetapi juga sebagai sektor yang mampu menopang dan memperkuat sistem ekonomi nasional di Indonesia (Hariyoko, 2018).

Pertumbuhan UMKM yang cepat tidak dapat dipisahkan dari peran pelaku usaha yang memiliki kemampuan untuk bertahan sekaligus bersaing dalam arus perekonomian global. Keberhasilan UMKM juga ditentukan oleh berbagai faktor pendukung yang memungkinkan usaha tetap berjalan, di antaranya ketersediaan modal, karakteristik kewirausahaan, serta penerapan

strategi pemasaran yang tepat (Pamungkas & Hidayatulloh, 2019).

Penguatan jiwa kewirausahaan menjadi penting karena persaingan usaha semakin ketat. Tanpa kreativitas dan inovasi, daya saing UMKM akan melemah dan berisiko mengancam keberlangsungan usahanya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan semangat kewirausahaan pada pelaku UMKM (Fadhillah & Yuniarti, 2023).

Menurut (Rizky *et al.*, 2022) Pengembangan UMKM dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, salah satunya dengan memberikan pelatihan guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan kewirausahaan, mendorong inovasi dalam produk, serta menumbuhkan semangat dan jiwa wirausaha.

Tata Kelola Kolaboratif merupakan interaksi, perspektif dan kerjasama dari berbagai aktor dengan menyangkut beberapa kepentingan seperti individual, lembaga atau stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung ataupun tidak dalam tujuan yang sejalan. Keberhasilan dalam Tata Kelola Kolaboratif ini akan mencerminkan para pelaku dalam menangani isu-isu publik, Kerjasama yang dijalin oleh pemerintah ini adalah upaya untuk melaksanakan kebijakan publik dalam merespon tantangan yang muncul, dan hasilnya akan mengatasi permasalahan publik (Indira Arundinasari, 2022).

Munculnya Kontribusi terhadap pengelolaan dan penggerak industri sebagai upaya pemecahan masalah yang memiliki legitimasi kuat dan harus melibatkan berbagai kelompok atau sektor yakni pemerintah, masyarakat dan swasta. keterlibatan antar tiga sektor tersebut dapat dikenal dengan skema *collaborative governance* (Suswanta, 2023).

Collaborative governance mengandung makna bahwa sektor non-publik turut memikul tanggung jawab atas setiap keputusan kebijakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, setiap pihak perlu terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan (Danastry & Kurniawan, 2021)

Menurut (Wibowo, 2020) Sudut pandang *collaborative governance* banyak digunakan dalam menangani persoalan di tingkat lokal, karena pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam

menjalankan tugas pemerintahan. Dengan melibatkan berbagai aktor kebijakan, *collaborative governance* dianggap sebagai bentuk tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance.

Berdasarkan penelitian terdahulu penelitian yang berjudul “Collaborative Governance Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kabupaten Berau” merupakan penelitian menggunakan metode Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif Peneliti menjabarkan focus penelitian tersebut dengan pengembangan analisa teori proses collaborative governance oleh Morse & Stephens. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi dan menggunakan teknik analisa data. Hasil penelitian menunjukkan adanya kolaborasi yang efektif antara berbagai aktor dalam mengembangkan UMKM Kabupaten Berau. Kolaborasi ini dapat dibagi menjadi beberapa tahap penting: 1. Assessment Semua aktor kolaborasi memiliki komitmen yang sama untuk memajukan UMKM, dengan masing-masing menjalankan peranannya secara aktif untuk mencapai misi bersama. 2. Initiation, Diskoperindag berperan aktif dalam memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM, bekerja sama dengan PT Berau Coal sebagai mentor dan pemateri. 3. Deliberation, Diskoperindag berhasil menjalin komunikasi yang baik dengan pelaku UMKM, menunjukkan keterbukaan terhadap usulan dan masukan dari mereka. 4. Implementation, Diskoperindag berfungsi sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator dalam proses pengembangan UMKM di daerah tersebut. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM di Kabupaten Berau, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara keseluruhan. (Tritura Andang Mangeka, 2024).

Kemudian, berdasarkan penelitian terdahulu yang berjudul “COLLABORATIVE GOVERNANCE (Studi Tentang Kolaborasi antar Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo)”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menjelaskan kolaborasi proses kolaborasi yang terjalin melalui teori Collaborative Governance, dan menggunakan empat komponen utama dari Kick

Emerson. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa proses kolaborasi dalam pengembangan kawasan minapolitan di Sidoarjo telah berjalan cukup baik. Karena kolaborasi tersebut telah melalui tahapan keterlibatan prinsip, motivasi bersama dan kapasitas untuk melakukan aksi bersama. Kemudian, proses tersebut dilanjutkan dengan aksi kolaboratif yang dapat mempengaruhi dampak sementara. Penelitian ini juga menemukan bahwa kendala dalam pelaksanaan kolaborasi antara lain sulitnya pembentukan kelompok usaha menjadi badan hukum, kurangnya keberlanjutan kolaborasi (Luqito & Arrozaaq, 2016).

Selanjutnya, penelitian terdahulu yang berjudul “Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan UMKM” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi awal sebelum penelitian dan observasi ketika penelitian yang dilakukan oleh peneliti. teori collaborative governance oleh Emerson dan Nabatchi. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara keseluruhan, kolaborasi dalam pemberdayaan UMKM di Kampung Kue Rungkut Lor telah menunjukkan hasil yang positif, namun masih perlu diperbaiki aspek prosedural untuk legitimasi internal dalam kolaborasi dan keberlanjutannya agar dapat memberikan dampak yang lebih besar melalui motivasi agar dapat belajar dan berinovasi sehingga dapat berkelanjutan bagi pelaku usaha di daerah tersebut (Rahmadevi & Hertati, 2024).

Penelitian yang berjudul “Strategi Collaborative Governance dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada BPKPD Kota Banjar)” Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian kualitatif (qualitative research). Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi kepustakaan dan observasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Emerson, Nabatchi & Balogh yaitu model Collaborative Governance Regime (CGR) dan Strategi dalam collaborative governance dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjar menunjukkan kurang optimal, kurangnya regulasi teknis dan belum adanya hubungan seajar atau tidak ada lembaga khusus yang menangani penyeimbangan keterlibatan dari pihak yang terlibat (Mulyana, 2023).

Menurut (Maryam, 2016) Memahami *governance* berarti memahami integrasi peran antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam aturan yang disepakati bersama. Pemerintah bertugas menciptakan lingkungan yang kondusif, sektor swasta mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, sedangkan masyarakat sipil berperan aktif serta melakukan kontrol terhadap berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan politik.

Collaborative Governance adalah sebuah sistem yang mengatur satu atau lebih lembaga pemerintah secara langsung berinteraksi dengan pemangku kepentingan swasta dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang bersifat resmi, berfokus pada konsensus, dan diskusi yang bertujuan untuk merumuskan atau melaksanakan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik (Ansell & Gash, 2008).

Collaborative governance mengacu pada bagaimana proses beberapa pemangku kepentingan seperti pemerintah, swasta dan masyarakat bekerja sama dalam merumuskan atau menjalankan kebijakan serta program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Apriliani *et al.*, 2024).

Dan menurut (Zakiah *et al.*, 2024) Pendekatan *Collaborative Governance* dalam kebijakan publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik mampu menghasilkan program layanan yang lebih berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, guna memperkuat keterlibatan masyarakat, meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah, serta mewujudkan hasil kebijakan yang lebih optimal.

Pendekatan yang digunakan dalam mengukur *Collaborative Governance* dalam Pengembangan *UMKM Bidang Kuliner di Kabupaten Bogor* yaitu dengan menggunakan teori penelitian (Emerson *et al.*, 2012) model CGR yang memiliki 3 dimensi yaitu, Pendorong (Drivers), Dinamika Kolaborasi dan Tindakan dan Hasil (*Collaborative Actions and Outcomes*). Adapun hasil dari tanggapan pernyataan dari kuesioner atau dimensi setiap *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Bidang Kuliner di Kabupaten Bogor.

1.1 Dimensi Pendorong (Drivers)

Drivers atau faktor pendorong yang menjadi penyebab atau motivasi utama bagi aktor-aktor yang terlibat dalam suatu kolaborasi untuk bekerja sama. Dalam konteks teori CGR, dimensi ini sangat penting karena mereka menjelaskan alasan mengapa aktor memilih untuk berkolaborasi daripada bekerja secara independen atau dalam kompetisi.

Hasil penelitian tentang dimensi pendorong (drivers) dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Rekapitulasi Indikator Drivers atau Pendorong

No	Item Pertanyaan	Pegawai DISKOPUKM		Masyarakat (UMKM)	
		Mean	Kriteria Penilaian	Mean	Kriteria Penilaian
1.	Ketergantungan Pada salah satu pihak membuat tidak stabil	4,00	Baik	4,07	Baik
2.	Komunikasi yang tidak lancar antarpihak	4,24	Sangat Baik	4,07	Baik
3.	Pengembangan UMKM kuliner memerlukan keterlibatan berbagai pihak	4,29	Sangat Baik	4,33	Sangat Baik
4.	Kolaborasi diperlukan karena tiap aktor memiliki peran dan SDM yang berbeda	4,41	Sangat Baik	4,20	Baik
5.	Kepala DISKOPUKM berperan sebagai inisiator dalam kolaborasi bersama PT Indomarco Primatam	4,06	Baik	4,00	Baik
6.	Para Pimpinan stakeholder memiliki komitmen untuk menjaga kepercayaan	4,06	Baik	4,07	Baik

dan proses kolaborasi					
7.	Kolaborasi ini memberikan manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat	4,18	Baik	4,27	Sangat Baik
8.	Dukungan dari berbagai pihak membuat program pengembangan umkm	4,29	Sangat Baik	4,07	Baik
Jumlah		4,19	Baik	4,13	Baik

Sumber : Hasil Penelitian 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah nilai rata-rata pada Dimensi Pendorong (Drivers) yang terdiri 4 indikator (8 pernyataan) dari hasil jawaban responden Pegawai Diskopukm memperoleh 4,19 dengan kategori “Baik”. Sedangkan nilai rata-rata hasil jawaban responden UMKM kuliner yang bermitra dengan PT Indomarco Prismatama yaitu memperoleh 4,13 dengan kategori “Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa Collaborative Governance dalam optimalisasi pengembangan UMKM pada Dimensi Pendorong (Drivers) sudah dikatakan baik namun masih perlu adanya peningkatan agar kolaborasi tetap terus berlangsung.

1.2 Dimensi Dinamika Kolaborasi

Dinamika kolaborasi bahwasannya merupakan tahap-tahap kolaborasi sebagai suatu proses berurutan yang berlangsung seiring waktu, dimulai dari identifikasi masalah hingga penetapan agenda dan pelaksanaan.

Hasil penelitian tentang dimensi pendorong (drivers) dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Rekapitulasi Indikator Dinamika Kolaborasi

No	Item Pertanyaan	Pegawai DISKOPUKM		Masyarakat (UMKM)	
		Mean	Kriteria Penilaian	Mean	Kriteria Penilaian
1.	Diskusi dalam kolaborasi	4,41	Sangat Baik	4,13	Baik

2.	Proses pengambilan keputusan dalam kolaborasi	4,29	Sangat Baik	4,00	Baik
3.	Komitmen bersama terbangun	4,29	Sangat Baik	4,13	Baik
4.	Semua pihak memiliki semangat yang sama	4,18	Baik	4,07	Baik
5.	Keputusan dalam kolaborasi dibuat Bersama-sama	4,29	Sangat Baik	3,93	Baik
6.	Semua pihak memiliki kapasitas dan sumber daya	4,24	Sangat Baik	3,67	Baik
Jumlah		4,28	Sangat Baik	3,99	Baik

Sumber : Hasil Penelitian 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah nilai rata-rata pada Dimensi Dinamika Kolaborasi yang terdiri dari 3 indikator (6 pernyataan) dari hasil jawaban responden pegawai Diskopukm memperoleh 4,28 dengan kategori “Sangat Baik”. Sedangkan nilai rata-rata hasil jawaban responden UMKM kuliner yang bermitra dengan PT Indomarco Prismatama yaitu memperoleh 3,99 dengan kategori “Baik”. Hal ini menunjukkan Collaborative Governance pada optimalisasi pengembangan UMKM pada Dimensi Dinamika Kolaborasi sudah dikatakan baik hanya saja perlu adanya peningkatan kembali agar keberlanjutan kolaborasi terus berlanjut.

1.3 Dimensi Collaborative Actions and Outcomes (Tindakan dan Hasil)

Dimensi ini merupakan hasil nyata pada kolaborasi, menghasilkan dampak yang konkret dari kolaborasi untuk memecahkan masalah publik secara efektif. Potensi perubahan besar ini menjadi dasar bagi konsep adaptasi, yang dapat diartikan sebagai cara untuk merespons hasil dari kerja sama bersama. Adaptasi juga digunakan untuk menilai dampak baik maupun dampak buruk yang muncul selama proses kolaborasi berlangsung.

Hasil penelitian tentang dimensi Collaborative Actions and Outcomes (Tindakan dan Hasil) dapat

dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 Rekapitulasi Collaborative Actions and Outcomes (Tindakan dan Hasil)

No	Item Pertanyaan	Pegawai DISKOPUKM		Masyarakat (UMKM)	
		Mean	Kriteria Penilaian	Mean	Kriteria Penilaian
1.	Program hasil kolaborasi menjawab kebutuhan pelaku UMKM kuliner secara langsung.	4,06	Baik	4,20	Sangat Baik
2.	Kolaborasi antar pihak telah menghasilkan program nyata untuk mendukung UMKM kuliner.	4,18	Baik	4,27	Sangat Baik
3.	Program kolaborasi mendorong perubahan perilaku pelaku UMKM ke arah yang lebih profesional.	4,35	Sangat Baik	4,40	Sangat Baik
4.	Kolaborasi telah memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan pelaku UMKM kuliner.	4,29	Sangat Baik	4,33	Sangat Baik
5.	Kolaborasi terus dikembangkan melalui pertemuan rutin dan koordinasi berkelanjutan.	4,24	Sangat Baik	4,20	Sangat Baik
6.	Kolaborasi antar pihak dirancang untuk berlanjut dalam jangka panjang.	4,35	Sangat Baik	4,13	Baik
7.	Kolaborasi menghasilkan	4,24	Sangat Baik	4,13	Baik

	kebijakan baru atau adaptif yang mendukung UMKM kuliner.				
8.	Program kolaborasi ini menghadirkan cara baru yang efektif seperti peningkatan peluang usaha dan akses pasar untuk membantu pengembangan UMKM kuliner.	4,24	Sangat Baik	4,20	Sangat Baik
Jumlah		4,24	Sangat Baik	4,23	Sangat Baik

Sumber : Hasil Penelitian 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jumlah nilai rata-rata pada Dimensi Tindakan dan Hasil (Collaborative Actions and Outcomes) yang terdiri dari 4 indikator (8 pernyataan) dari hasil jawaban responden pegawai Diskopukm memperoleh 4,24 dengan kategori “Sangat Baik”. Sedangkan nilai rata-rata hasil jawaban responden UMKM kuliner yang bermitra dengan PT Indomarco Prisma Utama yaitu memperoleh 4,23 dengan kategori “Sangat Baik”. Hal ini menunjukkan Collaborative Governance pada optimalisasi pengembangan UMKM pada Dimensi Collaborative Actions and Outcomes (Tindakan dan Hasil) Kolaborasi DISKOPUKM dan UMKM kuliner di Kabupaten Bogor terbukti efektif, adaptif, dan berkelanjutan, serta membawa manfaat nyata untuk pemberdayaan pelaku UMKM hanya saja perlu adanya peningkatan kembali agar keberlanjutan kolaborasi terus berlanjut.

1) Pembahasan

Hasil penelitian collaborative governance dapat dilihat dari dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme dan bertujuan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Dalam metode ini, data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian kemudian dianalisis secara statistik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait collaborative governance dalam optimalisasi pengembangan UMKM Bidang Kuliner di Kabupaten Bogor

menunjukkan hasil akhir yaitu Pada dimensi pendorong kolaborasi yang terdiri dari indikator *Uncertainty*, *Interdependence*, *Leadership* dan *Consequential Incentives*, secara umum memperoleh penilaian baik hingga sangat baik. Penilaian tertinggi terlihat pada indikator *Interdependence* dengan rata-rata pegawai 4,41 dan UMKM 4,33 yang menunjukkan bahwa pengembangan UMKM kuliner memerlukan keterlibatan berbagai pihak dengan peran dan sumber daya yang berbeda, serta kolaborasi dianggap penting dalam pengembangan tersebut. Indikator *Leadership* memperoleh nilai baik dengan rata-rata pegawai 4,06 dan UMKM 4,00 yang menunjukkan bahwa kepemimpinan DISKOPUKM sebagai inisiator kolaborasi telah berjalan cukup baik namun masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam menjaga kepercayaan antar pihak dalam kolaborasi.

Dimensi dinamika kolaborasi yang meliputi *Principled Engagement*, *Shared Motivation*, dan *Capacity for Joint* memperoleh rata-rata 4,28 “Sangat Baik” oleh pegawai dan 3,99 “Baik” oleh UMKM. Hal ini menunjukkan adanya komitmen, diskusi, dan pengambilan keputusan bersama yang berjalan secara partisipatif dan inklusif. Namun, pada indikator *Capacity for Joint*, UMKM memberikan nilai lebih rendah 3,67, menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan kapasitas antar pihak dalam berkolaborasi yang memerlukan perhatian untuk pemerataan kapasitas sumber daya dan kemampuan teknis antar pelaku UMKM.

Dimensi Collaborative Actions and Outcomes (Tindakan dan Hasil) ini memperoleh penilaian rata-rata 4,24 “Sangat Baik” oleh pegawai dan 4,23 “Sangat Baik” oleh UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa program kolaborasi telah menjawab kebutuhan pelaku UMKM kuliner secara langsung, memberikan dampak positif dalam pemberdayaan, serta menghasilkan kebijakan dan inovasi baru yang mendukung keberlanjutan UMKM kuliner di Kabupaten Bogor. Adanya dampak positif pada aspek sosial dan lingkungan juga tercermin dari penilaian tinggi pada indikator *Social/Environmental Outcomes*.

Rekapitulasi dari 3 dimensi tersebut dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4 Rekapitulasi Hasil Collaborative Governance dalam Optimalisasi Pengembangan UMKM Bidang Kuliner di Kabupaten Bogor

Variabel	Dimensi	Indikator	Item Pernyataan	Pegawai DISKOP UKM		Masyarakat (UMKM)	
				Mean	Kriteria Penilaian	Mean	Kriteria Penilaian
Collaborative Governance	Drivers atau Pendorong	Uncertainty (Ketidakpastian)	Ketergantungan Pada salah satu pihak	4,00	Baik	4,07	Baik
			membuat tidak stabil				
			Komunikasi yang tidak lancar antarpihak	4,24	Sangat Baik	4,07	Baik
Collaborative Governance	Drivers atau Pendorong	Interdependence (Saling Ketergantungan)	Pengembangan UMKM kuliner memerlukan keterlibatan berbagai pihak	4,29	Sangat Baik	4,33	Sangat Baik
			Kolaborasi diperlukan karena tiap aktor memiliki peran dan SDM yang	4,41	Sangat Baik	4,20	Baik

	berbeda				
Leadership (Kepemimpinan)	Kepala DISKO PUKM berperan sebagai inisiator dalam kolaborasi bersama PT Indomaco Prismatic	4,06	Baik	4,00	Baik
	Para Pimpinan stakeholder memiliki komitmen untuk menjaga kepercayaan dan proses kolaborasi	4,06	Baik	4,07	Baik
	Kolaborasi ini memberikan manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat	4,18	Baik	4,27	Sangat Baik
	Dukungan dari berbagai pihak membuat program	4,29	Sangat Baik	4,07	Baik
Consequential Incentives (Konsekuensi insentif)					

			m	pe	ng	em	ba	ng	an	um	km
	Rata-Rata		4,19	Baik	4,13	Baik					
Keterlibatan Prinsip Bersama (Principled Engagement)	Diskusi dalam Kolaborasi	4,41	Sangat Baik	4,13	Baik						
	Proses Pengambilan Keputusan dalam Kolaborasi	4,29	Sangat Baik	4,00	Baik						
	Komitmen bersama terbangun	4,29	Sangat Baik	4,13	Baik						
Dinamika Kolaborasi	Motivasi Bersama (Shared Motivation)	4,18	Baik	4,07	Baik						
	Kapasitas Bersama (Capacity for Joint)	4,29	Sangat Baik	3,93	Baik						
Kapasitas Bersama (Capacity for Joint)	Semua pihak memiliki semangat yang sama	4,24	Sangat Baik	3,67	Baik						
	Semua pihak memiliki kapasitas dan sumber daya										
	Rata-rata		4,28	Sangat Baik	3,99	Baik					
Collaborative Actions and Outcomes (Tindakan dan Hasil)	Implementasi Program (Collaborative Actions)	4,06	Baik	4,20	Sangat Baik						
	Program hasil kolaborasi menjawab kebutuhan pelaku UMK M kuliner										

Total Rata-rata	4,24	Sangat Baik	4,12	Baik
-----------------	------	-------------	------	------

Sumber : Hasil Penelitian 2025

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa implementasi dari Collaborative Governance dalam menangani optimalisasi pengembangan UMKM Kuliner di Kabupaten Bogor telah berjalan dengan baik. Tanggapan dari responden Pegawai menunjukkan nilai rata-rata 4,24 dengan kategori “Sangat Baik”, Sedangkan tanggapan dari responden UMKM memperoleh nilai rata-rata 4,12 dengan kategori “Baik”. hal ini menunjukkan Kolaborasi antara Pemerintah, sektor swasta dan UMKM dalam pengembangan kuliner di Kabupaten Bogor berjalan dengan baik hingga sangat baik pada semua aspek Collaborative Governance (drivers, dinamika, tindakan & hasil). Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek komunikasi dan pemerataan kapasitas antar pihak agar kolaborasi dapat berjalan lebih inklusif dan efektif dalam mendukung pengembangan UMKM kuliner di Kabupaten Bogor secara berkelanjutan.

Penerapan kolaborasi dalam konteks ini secara nyata sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro. Perda ini menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah bersama dengan sektor swasta, masyarakat, dan pelaku usaha dalam mendorong pemberdayaan dan pengembangan UMKM melalui kemitraan yang inklusif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa model collaborative governance yang diterapkan dalam pengembangan UMKM kuliner di Kabupaten Bogor terbukti selaras dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Perda Kabupaten Bogor No. 1 Tahun 2019. Kolaborasi lintas aktor ini efektif dalam mendorong pemberdayaan UMKM secara partisipatif dan inovatif, meskipun masih diperlukan perhatian khusus terhadap penguatan kapasitas teknis dan manajerial pelaku UMKM untuk menciptakan kesetaraan dalam kerjasama.

Perbandingan penelitian-penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dan Teori Collaborative Governance model Collaborative

Governance Regime dari (Emerson *et al.*, 2012), yang melibatkan 32 Responden (17 Pegawai dan 15 UMKM Bidang Kuliner di Kabupaten Bogor yang terseleksi dan lolos administrasi bermitra dengan PT Indomarco) melalui teknik sampling jenuh dan purposive sampling. Sementara itu, studi oleh (Tritura Andang Mangeka, 2024) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Fokus mereka pada meningkatkan kapasitas dan daya saing UMKM Kabupaten Berau dengan menggunakan pengembangan analisa teori proses collaborative governance oleh Morse & Stephens. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif deskriptif, dengan model Collaborative Governance Regime (CGR) (Emerson *et al.*, 2012) yang memfokuskan pada upaya kolaborasi antar aktor dalam pengembangan UMKM Bidang Kuliner.

Perbedaan dalam pendekatan, tujuan, serta teori mencerminkan bahwa setiap penelitian disesuaikan dengan fokus dan cakupan kajian masing-masing. Penelitian ini menekankan pada pengukuran efektivitas kolaborasi dalam menghasilkan dampak nyata bagi UMKM bidang kuliner. Sedangkan, Studi UMKM Kabupaten Berau pada menekankan peningkatan kapasitas dan daya saing UMKM secara umum.

5. Kesimpulan dan Saran

Collaborative governance dalam pengembangan UMKM Bidang Kuliner di Kabupaten Bogor secara umum Dengan hasil ini, Kolaborasi menunjukkan bahwa antara Pemerintah, sektor swasta dan UMKM dalam pengembangan kuliner di Kabupaten Bogor berjalan dengan baik hingga sangat baik pada semua aspek Collaborative Governance (drivers, dinamika, tindakan & hasil). Meskipun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek komunikasi dan pemerataan kapasitas antar pihak agar kolaborasi dapat berjalan lebih inklusif dan efektif dalam mendukung pengembangan UMKM kuliner di Kabupaten Bogor secara berkelanjutan. Hal ini menjadikan harus adanya evaluasi berdasarkan tiga dimensi menurut teori (Emerson *et al.*, 2012), yaitu :

- 1) Pendorong (Drivers) - Secara keseluruhan, pendekatan collaborative governance terbukti efektif dalam mendorong pengembangan UMKM kuliner di Kabupaten Bogor, meskipun masih

diperlukan perbaikan dalam aspek kepemimpinan dan kepercayaan antar pihak.

- 2) Dinamika Kolaborasi – menandakan adanya ketimpangan kapasitas antar pihak yang perlu diatasi melalui peningkatan kemampuan dan sumber daya UMKM secara merata.
- 3) Tindakan dan hasil (Collaborative actions and outcomes) - menunjukkan bahwa kolaborasi telah efektif menjawab kebutuhan UMKM kuliner, mendorong pemberdayaan, menghasilkan kebijakan dan inovasi baru, serta memberi dampak positif pada aspek sosial dan lingkungan.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan arah bagi DISKOPUKM Kabupaten Bogor dan stakeholder terkait untuk menjadikan Collaborative Governance sebagai strategi pengembangan UMKM kuliner yang efisien dan berkelanjutan. Program pendampingan dan fasilitasi perlu dilaksanakan secara berkelanjutan, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan nyata UMKM kuliner.

Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Apriliansi, A., Wahyudin, C., Hastuti, A., Tri Ramdani, F., Andani, H., & Sonia Irlis, S. (2024). Collaborative Governance dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Melalui Pelatihan dan Pendampingan. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(3), 275–286. <https://doi.org/10.30997/qh.v10i3.15865>
- Danastry, A. G., & Kurniawan, T. (2021). Tata Kelola Kolaboratif pada Penetrasi Jaringan Fixed Broadband di Indonesia. *JlAP (Jurnal Ilmiah Administrasi Publik)*, 7(2), 158–163.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fadhillah, P., & Yuniarti, A. (2023). Pemberdayaan UMKM: Melihat Peluang Bisnis UMKM di Era Digital di Desa Ujunge Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset ...*, 2(1), 291–298. <http://jerkin.org/index.php/jerkin/article/view/176%0Ahttps://jerkin.org/index.php/jerkin/article/download/176/111>
- Fatimah, A. S. (2022). *COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN*. 2(3), 124–135.
- Ghazani, N. (2015). Kemitraan Pengembangan UMKM (Studi Deskriptif Tentang Kemitraan PT.PJB (Pembangkit Jawa Bali) Unit Gresik Pengembangan UMKM Kabupaten Gresik). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(2), 142–151.
- Hariyoko, Y. (2018). Pengembangan UMKM di Kabupaten Tuban. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(1), 1011–1015. <https://doi.org/10.30996/jpap.v4i1.1286>
- Hasan Haikal Tholib, Ahmadi, S., & Marzuki, A. (2023). MEMBANGUN DAYA SAING PARA PELAKU UMKM DI KABUPATEN BOGOR. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8.
- Hidayati, R., & Muslikh, N. (2018). Pelatihan Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Produk Ukm Di Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru Bogor. *ABDIMAS PEDAGOGI: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 15–20.
- Indira Arundinasari. (2022). Kolaborasi Tata Kelola Kampung Pelangi Kota Surabaya. *Journal Publicuho*, 5(3), 713–721. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.14>
- Kurniawan, A., & Alhifni, A. (2022). Peningkatan Kemandirian UMKM Melalui Pengembangan Digital Marketing dan Pelatihan Keterampilan Usaha. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 201–207. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v2i3.5450>
- Kustanti, R. (2022). Pengembangan UMKM Berbasis

- Ekonomi Kreatif di Kabupaten Jepara. *Jurnal Ekobistek*, 11, 239–244. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i3.366>
- Luqito, D., & Arrozaaq, C. (2016). (*Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo*).
- Maryam, N. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI(1), 1–18.
- Mulyana, A. (2023). Strategi Collaborative Governance dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada BPKPD Kota Banjar). *Jurnal Manajemen Kreatif Dan Inovasi*, 1(3), 160–180. <https://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jmki-widyakarya/article/view/734%0Ahttps://journal.widyakarya.ac.id/index.php/jmki-widyakarya/article/download/734/789>
- Pamungkas, H. A., & Hidayatulloh, A. (2019). Faktor penentu perkembangan umkm gerabah kasongan bantul yogyakarta. *Inovasi Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Manajemen*, 15(1), 65–71.
- Pratidina, G., Wahyudin, C., Apriliyani, N. V., & Amalia, N. (2023). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENINGKATAN DESA WISATA. *Jurnal Qardhul Hasan; Media Pengabdian Kepada*, 9, 34–41.
- Rahmadevi, R. T., & Hertati, D. (2024). Collaborative Governance Dalam Pemberdayaan UMKM. *Public Policy: Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik Dan Bisnis*, 5(1).
- Rizky, A. I., Kusumadewi, R., & Saefulloh, E. (2022). Pengaruh Pelatihan dan Karakteristik Wirausaha Terhadap Pengembangan UMKM (Studi Pada UMKM di Kecamatan Cigugur). *Entrepreneur: Jurnal Bisnis Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(1), 361–376. <https://doi.org/10.31949/entrepreneur.v3i1.1680>
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*.
- Suswanta. (2023). *Pemberdayaan Masyarakat Pantai Trisik Dalam Perspektif Collaborative Governance* Suswanta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 5, 1–9. <https://doi.org/10.31258/unricsce.5.1-9>
- Tritura Andang Mangeka. (2024). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KABUPATEN BERAU. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 3(10).
- Wibowo, A. N. F. A. (2020). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PELAYANAN TRANSPORTASI PUBLIK (STUDY BRT TRANS SEMARANG). *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia p-ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398*, 5(3).
- Zakiah, R. U., Fadhillah, D. N., Gustina, R., Ratnasari, T., Hermawan, D., & Ramdani, F. T. (2024). Collaborative Governance dalam Kebijakan Publik melalui Aplikasi Akses Layanan Instan Kota Bogor (ASINAN BOGOR) Studi Kasus: Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor. *Karimah Tauhid*, 3(3), 3504–3511. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12423>